

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN TANTANGAN REVITALISASI

**Yulia Indahri
Elga Andina
Shanti Dwi Kartika**

Penyunting:
Santri E. P. Djahimo, Ph.D.

Judul:

Sekolah Menengah Kejuruan
dan Tantangan Revitalisasi

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
xvi+157 hlm; 16x23 cm
ISBN: 978-623-6548-30-1
Cetakan Pertama, 2020

Penulis:

Yulia Indahri
Elga Andina
Shanti Dwi Kartika

Penyunting

Santri E. P. Djahimo, Ph.D.

Pemeriksa Naskah Cetak

Kisno Umbar

Desain Sampul:

Fajar Wahyudi

Tata Letak:

Yulia Indahri

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Gedung Nusantara I Lt. 2
Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerja Sama dengan:

Intrans Publishing, Anggota IKAPI Jawa Timur
Wisma Kalimetro Jl. Joyosuko Metro No 42 Merjosari
Malang, Jawa Timur, Indonesia
Telp. (0341) 573650 Fax. (0341) 588010
redaksi.intrans@gmail.com
<http://intranspublishing.com>

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya pada para peneliti di Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga tim yang terdiri dari peneliti bidang Kesejahteraan Sosial dan bidang Hukum dapat berkolaborasi dan menyelesaikan penulisan buku yang berjudul “Sekolah Menengah Kejuruan dan Tantangan Revitalisasi”.

Buku ini terbit sebagai hasil dari kajian yang awalnya merupakan penugasan dari Komisi X DPR RI. Secara umum, Komisi X ingin mendapatkan masukan mengenai sistem pendidikan nasional yang saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat secara paralel Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI juga sedang menyusun rancangan undang-undang tersebut, maka Tim Peneliti memfokuskan kajian pada pengelolaan pendidikan kejuruan. Komisi X pada saat bersamaan juga membentuk Panitia Kerja Pendidikan Vokasi (Panja Vokasi) yang merupakan panja pengawasan.

Penelitian yang dilakukan Tim Peneliti sebagai jawaban atas penugasan Komisi X berjudul “Evaluasi Strategi Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan”. Satu bagian dari buku ini, tepatnya Bab V, berisikan temuan kajian revitalisasi SMK secara umum dan temuan penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Penelitian dilakukan oleh lima orang peneliti yaitu Yulia Indahri, S.Pd., M.A., Dr. Achmad Muhaddam F., S.Ag., M.A., Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi., Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn., Elga Andina, S.Psi., M. Psi., dan Fieka Nurul Arifa, M.Pd., dengan bidang kepakaran yang berbeda-beda.

Buku ini mengulas berbagai hal mengenai SMK sebagai salah satu pendidikan kejuruan di jenjang pendidikan menengah yang berupaya mengembangkan diri agar mampu mempersiapkan lulusannya untuk bersaing. Persaingan tidak hanya dengan sesama lulusan pendidikan vokasi, tetapi juga dengan lulusan kejuruan tingkat regional dengan semakin terbukanya batas negara. Apa yang menjadi

dasar pelaksanaan pendidikan secara umum, bagaimana dengan pendidikan kejuruan, apa yang dimaksud dengan revitalisasi SMK, dan juga yang tidak bisa dihindari adalah bagaimana SMK mengubah model belajar dan pembelajaran dalam menghadapi pandemi COVID-19, merupakan satu bagian yang dapat ditemui dalam buku ini.

Saya berharap hasil penelitian dan kajian literatur yang telah disusun di buku ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perumusan kebijakan pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi, dan pendidikan pada umumnya. Apalagi saat ini sudah ada kesamaan pemahaman dari Pemerintah dan juga DPR RI bahwa sistem pendidikan nasional perlu diubah untuk menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang merupakan keniscayaan.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan apresiasi yang mendalam untuk para penulis yang secara inovatif dan konstruktif telah berusaha menuangkan hasil pemikiran mereka yang terbaik bagi pembangunan masyarakat dan bangsanya. Buku ini sangat layak dibaca para pengambil kebijakan pendidikan dan para pemerhati pendidikan untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Oktober 2020
Kepala Pusat Penelitian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si.

Prolog

Banyak perubahan dalam berbagai hal yang terjadi seiring berjalannya waktu. Perubahan-perubahan tersebut pada akhirnya mendorong dunia untuk dapat beradaptasi secara cepat. Perubahan yang cukup drastis dan sporadis akan memberikan tantangan bagi semua pihak, baik individu maupun kelompok untuk menunjukkan eksistensi mereka. Salah satu aspek yang mengalami perubahan secara drastis yaitu pendidikan yang berperan sangat penting dalam memberi arah kemajuan bagi kehidupan manusia. Perubahan selalu menjadi salah satu alasan terjadinya perbaikan.

Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, mempunyai kewajiban melakukan perbaikan-perbaikan yang dimaksud demi memperbaiki kehidupan rakyat.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam satu dekade mendatang yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk diperbaiki adalah bonus demografi. Puncak bonus demografi Indonesia akan terjadi pada 2030–2040, di mana pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Bonus demografi juga berpotensi menjadi masalah sosial jika tidak dipersiapkan dengan matang.

Pemerintah juga sedang mengupayakan peningkatan iklim bisnis dan industri melalui paket deregulasi, dan pada saat yang sama sementara berupaya beradaptasi dengan perubahan melalui inisiatif meningkatkan kemampuan dan keahlian tenaga kerja sejak masa pendidikan, dimulai dari jenjang pendidikan menengah. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia (Inpres 9/2016) menjadi salah satu jawaban pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan secara masif dan substansial melalui reformasi pendidikan di jenjang pendidikan menengah.

Reformasi pendidikan diperlukan untuk mewujudkan visi Indonesia pada tahun 2025 yang diproyeksikan menjadi salah satu negara kejuruan (vokasi), dengan rasio jumlah siswa umum (SMA)

dan SMK berkisar 30:70. Adapun hasil yang diharapkan adalah mulai dari kabupaten/kota sampai dengan nasional akan dikuasai oleh sekolah kejuruan melalui pendekatan kreativitas yang ada di wilayah, pendekatan kapabilitas dengan *re-thinking skills*, pendekatan formasi kerja, dan pendekatan dunia usaha dan/atau dunia industri (DUDI).

Revitalisasi ini diperlukan mengingat beragamnya tantangan yang dihadapi SMK dalam menjawab tuntutan pemenuhan tenaga kerja Indonesia. Tantangan tersebut tidak hanya menyangkut berbagai hal yang terkait langsung dengan SMK atau bersifat internal, seperti sarana dan prasarana (sarpras), pendidik dan tenaga kependidikan, serta kurikulum, tetapi juga berasal dari luar atau faktor lingkungan eksternal, terutama kebijakan pemerintah dan lingkungan DUDI yang menjadi variabel penting dalam upaya pengelolaan SMK. Hal yang patut disayangkan yaitu peningkatan kuantitas SMK tidak diiringi dengan peningkatan kualitasnya. Setelah empat tahun program revitalisasi diluncurkan, peta jalan pendidikan vokasi belum dapat disusun di semua provinsi.

Beberapa kajian yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas SMK sudah pernah dilakukan, salah satunya oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI (2019) melalui laporan kajian Potret Pendidikan Vokasi Indonesia yang mengevaluasi peluang pendidikan vokasi untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja industri 4.0. Dalam laporannya, Pusat Kajian Anggaran menyarankan beberapa langkah kebijakan, yaitu: (1) Mengembangkan seluruh SDM yang terlibat pada suatu organisasi pendidikan untuk menjadi lebih responsif dan inovatif; (2) Meningkatkan kerja sama pendidikan vokasi dengan DUDI; (3) Membangun pusat-pusat inovasi; serta (4) Membentuk sinergitas antar kementerian/lembaga terkait.

Kajian Malik, Jasmina, dan Ahmad (2019) dalam Laporan Akhir *Chapeau Paper Indonesia Technical and Vocational Education and Training* memberi sembilan saran praktis yang perlu diperhatikan setelah tim melakukan kajian terhadap berbagai kebijakan mengenai pendidikan vokasi secara umum (bukan hanya SMK). Saran terpenting yang disampaikan adalah mengembangkan sistem dan melembagakan reformasi pendidikan vokasi secara nasional. Kajian nasional ini dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)

dalam upaya memetakan beragam program kebijakan serta *roadmap* yang disiapkan masing-masing *stakeholders*. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi inkonsistensi kebijakan yang sudah ada untuk kemudian dapat dilakukan konsolidasi.

Kemendikbud juga sudah beberapa kali melakukan evaluasi dan kemudian membentuk direktorat jenderal baru, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) di tahun 2020. Tugas dari Ditjen Diksi adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, diatur bahwa Ditjen Diksi terdiri dari lima unit, yang salah satunya adalah Direktorat SMK (Dit. SMK).

Adapun pelaksanaan tugas Dit. SMK dilakukan melalui:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarpras, tata kelola, dan penilaian pada SMK dan pendidikan layanan khusus pada SMK;
- 2) Perumusan standar di bidang peserta didik, sarpras, tata kelola, dan penilaian pada SMK dan pendidikan layanan khusus pada SMK;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarpras, tata kelola, dan penilaian pada SMK dan pendidikan layanan khusus pada SMK;
- 4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarpras, tata kelola, dan penilaian pada SMK dan pendidikan layanan khusus pada SMK;
- 5) Fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarpras, tata kelola, dan penilaian pada SMK dan pendidikan layanan khusus pada SMK;
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarpras, tata kelola, dan penilaian pada SMK dan pendidikan layanan khusus pada SMK;
- 7) Penyiapan pemberian izin penyelenggaraan SMK yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing; dan
- 8) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarpras, tata kelola, dan penilaian pada SMK dan pendidikan layanan khusus pada SMK.

Delapan fungsi tersebut sudah dilaksanakan sejak Inpres 9/2016 ditetapkan dan juga tertuang dalam standar nasional pendidikan yang menjadi pedoman peningkatan mutu pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat mendorong Dit. SMK untuk lebih fokus bekerja dalam mencapai target yang ditetapkan pemerintah.

Buku yang berisi delapan bab ini diharapkan dapat memberikan sedikit pemahaman mengenai SMK -sebagai salah satu pendidikan kejuruan di jenjang pendidikan menengah-dalam upayanya untuk mengembangkan diri sehingga mampu mempersiapkan lulusannya untuk dapat bersaing. Persaingan tidak hanya terjadi di antara sesama lulusan pendidikan vokasi, tetapi juga dengan lulusan kejuruan tingkat regional dengan semakin terbukanya batas negara. Apa yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan secara umum, bagaimana dengan pendidikan kejuruan, apa yang dimaksud dengan revitalisasi SMK, dan juga yang tidak bisa dihindari adalah bagaimana SMK mengubah model belajar dan pembelajaran dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Melalui prolog ini dapat disampaikan juga bahwa salah satu bab di dari buku ini merupakan sari dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Indahri, S.Pd., M.A., Dr. Achmad Muhaddam F., S.Ag., M.A., Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi., Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn., Elga Andina, S.Psi., M. Psi., dan Fieka Nurul Arifa, M.Pd. ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kebijakan pengembangan SMK, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, tim peneliti ini juga ingin mengetahui kebijakan seperti apa yang telah diimplementasikan di masing-masing provinsi untuk merevitalisasi SMK dan implikasi yang muncul ketika revitalisasi SMK mengharuskan sinergi dari awal hingga akhir dengan berbagai *stakeholders*.

Tujuan khusus dari penulisan buku ini adalah sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Anggota DPR RI yang menangani masalah pendidikan, terutama pendidikan kejuruan, dalam melaksanakan fungsinya di bidang pengawasan, anggaran, ataupun legislasi. Selain itu, hasil penelitian yang ada juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi Komisi X DPR RI dalam membahas

rancangan undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional yang sedang disusun oleh DPR RI. Besar harapan kami sebagai penyunting kiranya buku ini dapat menjangkau dan bermanfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, Oktober 2020

Penyunting

Santri E. P. Djahimo, Ph.D.

Daftar Isi

Sekolah Menengah Kejuruan dan Tantangan Revitalisasi

Kata Pengantar.....	iii
Prolog.....	v
Daftar Isi.....	xi
Daftar Grafik.....	xiv
Daftar Bagan.....	xiv
Daftar Tabel.....	xv

Bab I **Pendahuluan**

I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Permasalahan.....	5
I.3. Sistematika Buku.....	8
I.4. Tujuan Penulisan.....	9

Bab II **Pendidikan di Indonesia**

II.1. Sejarah Pendidikan di Indonesia.....	11
II.2. Hakikat Pendidikan di Indonesia.....	14

Bab III **Pendidikan Kejuruan di Indonesia**

III.1. Pendidikan Kejuruan Masa Kolonial.....	20
III.2. Pendidikan Kejuruan pada Masa Pasca-Kemerdekaan.....	24
III.3. Nomenklatur SMK Pasca-Kemerdekaan.....	33

Bab IV**Kondisi Dinamis Pendidikan Kejuruan**

IV.1. Kondisi SMK Saat Ini.....	39
IV.2. Peraturan Pendukung	48

Bab V**Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan**

V.1. Peran <i>Stakeholders</i>	70
V.2. Revitalisasi SMK di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta....	84
V.3. Revitalisasi SMK di Provinsi Sulawesi Tenggara.....	93
V.4. Urgensi Pengaturan SMK dalam Undang-Undang	100

Bab VI**SMK di Masa Pandemi COVID-19**

VI.1. Kelembagaan dan Sistem Pendidikan Kejuruan	108
VI.2. Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Sekolah Kejuruan di Indonesia	110
VI.3. Kebijakan Jangka Panjang.....	114

Bab VII**Dukungan DPR RI terhadap Revitalisasi SMK**

VII. 1. Panitia Kerja Pendidikan Vokasi Komisi X DPR RI	117
VII.2. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Melalui Panitia Kerja.....	119
VII.3. Masukan <i>Stakeholders</i>	123
VII.4. Alokasi Anggaran	126

Bab VIII**Penutup**

VIII.1. Simpulan	129
VIII.2. Saran.....	131

Tantangan Revitalisasi

xiii

Epilog	135
Daftar Pustaka.....	139
Biografi Penyunting	149
Biografi Penulis	150
Indeks	153

Daftar Grafik

Grafik 1. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan, Tahun 2010 dan 2018	2
Grafik 2. Sebaran Sekolah Menengah Kejuruan per Pulau Besar, Tahun 2020	40
Grafik 3. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan, Tahun 2020.....	41
Grafik 4. Perkembangan Jumlah SMK dan Siswa SMK, Tahun Ajaran 2015/2016–2019/2020	42
Grafik 5. Proporsi Kompetensi Keahlian SMK.....	47
Grafik 6. Jumlah SMK Berdasarkan Bidang Keahlian, Tahun 2020	47
Grafik 7. Jumlah Siswa SMK Berdasarkan Bidang Keahlian, Tahun 2020	48
Grafik 8. Tanggapan terhadap <i>New Normal</i> SMK.....	111

Daftar Bagan

Bagan 1. Tantangan SMK	5
Bagan 2. Tema Pembangunan Pendidikan, 2005–2024.....	16
Bagan 3. Pola Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan Berdasarkan Pembangunan Lima Tahun I s.d. V	25
Bagan 4. Struktur Sistem Pendidikan Indonesia	50
Bagan 5. Implementasi <i>Roadmap</i> Vokasi.....	75
Bagan 6. Kesenjangan antara SMK dengan DUDI	125

Daftar Tabel

Tabel 1.	Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, per Februari 2016–2020 (juta orang).....	3
Tabel 2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, per Februari 2016–2020 (persen)	4
Tabel 3.	Periodisasi Pendidikan Kejuruan di Indonesia.....	36
Tabel 4.	Jumlah SMK Berdasarkan Akreditasi, Tahun 2020.....	40
Tabel 5.	Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.....	43
Tabel 6.	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Layak Mengajar di SMK, Tahun 2016–2020.....	64
Tabel 7	<i>Stakeholders</i> berdasarkan Instruksi Presiden terkait Revitalisasi SMK.....	71
Tabel 8.	Program Revitalisasi 5.000 SMK, Tahun 2020–2024	83
Tabel 9.	Proporsi Perbandingan SMA dan SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2016–2020.....	86
Tabel 10.	Jumlah SMK Berdasarkan Bidang Keahlian di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2020.....	86
Tabel 11.	Jumlah Siswa SMK Berdasarkan Bidang Keahlian di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2020.....	87
Tabel 12.	Jumlah SMK Berdasarkan Target Revitalisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2020.....	87
Tabel 13.	Jumlah Guru SMK berdasarkan Status Kepegawaian di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2020.....	90
Tabel 14.	Jumlah Guru SMK berdasarkan Status Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2020.....	90
Tabel 15.	Proporsi Perbandingan SMA dan SMK di Sulawesi Tenggara, Tahun 2016–2020	95
Tabel 16.	Jumlah Siswa SMK Berdasarkan Bidang Keahlian di Sulawesi Tenggara, Tahun 2020	95
Tabel 17.	Jumlah SMK Berdasarkan Target Revitalisasi di Sulawesi Tenggara, Tahun 2020	96

Tabel 18. Jumlah Guru SMK berdasarkan Status Kepegawaian di Sulawesi Tenggara, Tahun 2020	97
Tabel 19. Jumlah Guru SMK berdasarkan Status Pendidikan di Sulawesi Tenggara, Tahun 2020	98
Tabel 20. Jumlah Sarana dan Prasarana Rusak Berat, 2019	124

Bab VIII

Penutup

VIII.1. Simpulan

Perubahan teknologi telah mendorong dunia untuk beradaptasi dengan segala otomatisasi, sistem kapitalisme baru, dan perubahan kebutuhan keterampilan. Tantangan ini perlu dihadapi dengan persiapan dari segala sektor. Pemerintah menyadari potensi berbahaya dari kondisi berkompetisi tanpa dukungan SDM yang mumpuni. Ada kekhawatiran akan banyaknya penganggur berusia muda yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Keberadaan SMK menjadi pusat perhatian karena lulusan SMK merupakan penyumbang terbesar pengangguran di Indonesia.

Sejarah dan kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari perkembangan pendidikan dan maju atau tidaknya pendidikan yang berkembang di bangsa itu. Jika dirunut sejarahnya, pendidikan Indonesia dimulai dari zaman prasejarah dan berlanjut hingga saat ini dengan berbagai dinamikanya. Sistem pendidikan mengalami perubahan seiring dengan perubahan dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik kemasyarakatan yang memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. Pendidikan di Indonesia sejak kemerdekaan terus berupaya menyesuaikan dengan kondisi internal yang mencoba menanamkan jati diri sebagai bangsa dan menjaga semangat bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan.

Nomenklatur pendidikan kejuruan juga sering berubah menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Terakhir, pemerintah berupaya mendorong kualitas lulusan pendidikan menengah kejuruan yang *link and match* dengan kebutuhan DUDI. Kebijakan dalam bentuk regulasi disusun dalam kerangka menyusun fondasi kesiapan bersaing secara berkualitas dalam lingkup global.

Inpres 9/2016 memberikan arahan kepada seluruh *stakeholders* untuk menghasilkan lulusan SMK yang mumpuni. Reformasi pendidikan diperlukan untuk mewujudkan visi Indonesia pada tahun 2025 yang diproyeksikan menjadi salah satu negara kejuruan (vokasi),

dengan rasio jumlah siswa SMA dan SMK berkisar 30:70. Revitalisasi SMK merupakan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan SDM. Revitalisasi diperlukan mengingat beragamnya tuntutan yang dihadapi SMK dalam menjawab tantangan pemenuhan tenaga kerja Indonesia. Paling tidak sebelas *stakeholders* urun kerja untuk merevitalisasi SMK.

Sistem yang diadopsi pemerintah untuk pendidikan vokasi adalah pendidikan menengah vokasi (*vocational and technical secondary school*) yang dituangkan dalam tiga program pendidikan lanjutan, yaitu SMK/MAK, BLK, dan politeknik. Ketiga opsi itu dikenal dengan prinsip BMW, yaitu bekerja, melanjutkan, dan wirausaha (*work, continue to higher education, and entrepreneurship*).

Setelah dua tahun program revitalisasi diluncurkan, peta jalan pendidikan vokasi belum dapat disusun di semua provinsi. Masih rendahnya kualitas pendidikan di SMK merupakan komplikasi dari permasalahan kurikulum yang kurang fleksibel dengan perkembangan zaman; SDM guru produktif lebih sedikit dibandingkan guru normatif; masih tingginya kesenjangan kompetensi lulusan SMK yang dapat diserap dunia kerja, serta masih minimnya pelatihan vokasional.

Diskusi pada bab khusus mengenai Revitalisasi SMK yang juga merupakan hasil kajian para peneliti Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal DPR RI menyimpulkan bahwa jika ada aturan khusus mengenai SMK, lima area revitalisasi SMK dapat menjadi awal dalam mempertimbangkan pengaturan SMK yang lebih komprehensif. Bisa jadi pengaturan tersebut tidak dalam bentuk undang-undang, tetapi dalam bentuk peraturan di bawahnya atau bahkan memperkuat Inpres yang telah ada.

Kajian bab selanjutnya mengenai pandemi COVID-19 yang juga didasarkan pada diskusi mengenai kesiapan pendidikan kejuruan dalam menghadapi pandemi di negara lain menyadarkan kita bahwa rencana pengembangan pendidikan kejuruan tidak berhenti pada jangka pendek, menengah, dan panjang yang dapat diprediksi saja. Ketika ada situasi darurat, pendidikan secara umum dan pendidikan kejuruan dengan kekhususannya, harus mampu beradaptasi dengan cepat dan mencari jalan keluar terbaik untuk semua pihak.

Guna mendukung kinerja DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang akan berimbas pada pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran, Komisi X DPR RI yang bermitra dengan Kemendikbud membentuk Panja khusus mengenai pendidikan vokasi yang salah

satunya mengawasi pelaksanaan kebijakan di SMK. Terbatasnya anggaran, jumlah institusi pendidikan kejuruan yang masih rendah, hingga stigma masyarakat yang memandang rendah lulusan kejuruan mendorong Komisi X untuk melakukan pengawasan terhadap pengembangan dan revitalisasi SMK.

Kesimpulan utama dari kajian dalam buku ini adalah revitalisasi SMK merupakan langkah lanjutan untuk menyelesaikan permasalahan kualitas lulusan SMK yang diberi label kurang mampu bersaing dengan lulusan pendidikan vokasi lainnya. Walaupun sebenarnya SMK dibentuk dengan harapan lulusan SMK lebih unggul dibandingkan lulusan jenjang pendidikan menengah lainnya. Tiga kebijakan reformasi yang menjadi perhatian DPR RI adalah agar kebijakan revitalisasi SMK dapat menjembatani SMK untuk dapat memiliki mitra DUDI yang sesuai serta adanya jalan bagi SMK untuk menjadi BLUD. Kedua upaya khusus untuk SMK tersebut perlu didukung dengan anggaran yang memadai.

VIII.2. Saran

Sudah ada beberapa kajian yang dilakukan untuk mengevaluasi kualitas SMK atau melihat peran SMK dalam pembangunan. Bahkan Kemendikbud sebagai *leading sector* revitalisasi SMK berdasarkan Inpres 9/2016 juga menyimpulkan ada kesulitan dalam meningkatkan kualitas lulusan SMK sehingga mendukung sepenuhnya revitalisasi SMK dan membuka diri untuk berkoordinasi dengan berbagai *stakeholders*.

Buku ini tidak bermaksud memberikan saran praktis untuk menyelesaikan masalah pendidikan kejuruan di SMK karena berdasarkan sejarahnya, perbaikan sistem pendidikan sudah melalui dan akan selalu melalui perjalanan panjang. Tetapi persyaratan utama yang dapat dijadikan saran adalah terus mengingat bahwa negara mempunyai fungsi pendidikan (*educational function*) yang diturunkan dari tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan fungsi pendidikan tersebut, negara mempunyai tanggung jawab dan kewajiban atas pendidikan, terpenuhinya hak asasi bidang pendidikan, dan hak konstitusional atas pendidikan bagi setiap orang di Indonesia dan setiap warga negara Indonesia.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka paradigma universal yang perlu diperhatikan dalam merevitalisasi pendidikan kejuruan adalah:

- 1) Pemberdayaan manusia seutuhnya.
- 2) Pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada siswa.
- 3) Pendidikan adalah untuk semua.
- 4) Pendidikan adalah untuk perkembangan.

Selain itu, model pendidikan kejuruan yang dapat dijadikan *benchmark* adalah:

- 1) Model sekolah.
- 2) Model magang.
- 3) Model sistem ganda.
- 4) Model *school-based enterprise*.

Pengalaman baru dunia pendidikan dalam menghadapi masa darurat seperti pandemi COVID-19 mendorong seluruh *stakeholders* untuk mengakui bahwa pengelolaan SMK perlu beradaptasi cepat dengan perubahan. Untuk jangka pendek, harus ada jaminan siswa tetap memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan mengasah keterampilan yang diperlukan agar siap dipraktikkan begitu siswa lulus. SMK harus dapat menyediakan PJJ atau pembelajaran model lain yang lebih fleksibel. Untuk jangka menengah kurikulum perlu disusun dengan sistem fleksibel atau pilihan alternatif yang tidak mengabaikan kekhususan SMK. Sedangkan untuk jangka panjang, sesuai dengan cita-cita bersama, maka inovasi penyelenggaraan pendidikan dikoordinasikan oleh Kemendikbud agar memberi jaminan kesinambungan pendidikan, serta terus menjalin kerja sama dengan seluruh *stakeholders*.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, maka pelaksanaan satu fungsi akan memengaruhi pelaksanaan fungsi yang lain. Di bidang legislasi, untuk pengaturan lebih lanjut tentang pendidikan vokasi pada umumnya, dan pendidikan di SMK pada khususnya, kajian peneliti di Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal DPR RI menyimpulkan bahwa perancangan undang-undang khusus mengenai vokasi belum diperlukan. Jika ada keinginan untuk mengubah pengaturan dalam sistem pendidikan nasional, maka revitalisasi SMK yang sudah berjalan saat ini dapat menjadi titik awal.

Fungsi pengawasan yang langsung dilaksanakan oleh Anggota DPR RI menemukan bahwa kesenjangan antara lulusan SMK dengan kebutuhan DUDI sangatlah nyata. Oleh karena itu, karena

bersama pemerintah (Kemendikbud) dan DPR RI (Komisi X) dapat mengusulkan anggaran khusus untuk mengatasi kesenjangan tersebut, maka salah satu usulan dari Panja Vokasi adalah dukungan anggaran yang memadai untuk melaksanakan revitalisasi SMK, terutama revitalisasi sarpras. Alokasi anggaran revitalisasi harus difokuskan pada upaya:

- 1) Menjembatani lembaga pendidikan kejuruan untuk dapat memiliki mitra industri yang sesuai.
- 2) Memberikan celah bagi SMK untuk menjadi BLUD.
- 3) Memberikan insentif bagi guru yang melakukan pendampingan di ruang praktik, laboratorium, atau *workshop*.
- 4) Melakukan evaluasi lembaga pendidikan vokasi yang lulusannya memiliki daya serap rendah di DUDI.

Kajian lebih lanjut mengenai pendidikan kejuruan secara khusus dan pendidikan vokasi secara umum masih perlu terus dilakukan. Keterlibatan Indonesia di lingkup ASEAN dalam *Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for TVET* (SEAMEO VOCTECH) dan secara global dalam *UNESCO and Vocational Education* (UNEVOC) dapat membuka peluang untuk terus berupaya mencari cara terbaik dalam mengembangkan pendidikan vokasi. Belum lagi beririsannya kajian tentang vokasi dengan tantangan dunia kerja dan DUDI menjadikan SMK sumber kajian yang akan terus menarik untuk ditelusuri.

Epilog

SDM berkualitas yang diluluskan dari SMK merupakan aset bangsa di tengah tantangan global yang mengharuskan adanya koordinasi bersama dari berbagai pihak. Harapan agar lulusan SMK mampu melaksanakan fungsinya secara optimal harus didukung oleh semua *stakeholders*. Revitalisasi SMK yang sudah dimulai sejak tahun 2016 melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia (Inpres 9/2016) merupakan langkah awal yang dianggap penting untuk menyelesaikan permasalahan kualitas lulusan SMK yang diberi label kurang mampu bersaing dengan lulusan pendidikan vokasi lainnya. Hal ini bertolak-belakang dengan harapan awal pembentukan SMK yang mana lulusannya diharapkan lebih unggul dibandingkan lulusan jenjang pendidikan menengah lainnya.

Karakter pendidikan kejuruan juga tidak sama dengan jenis pendidikan lain yang ada di Indonesia. Salah satu alasan dari perbedaan karakter adalah karena orientasi lulusan SMK ada pada kinerja individu yang akan bekerja di dunia usaha dan/atau dunia industri (DUDI). Penjabaran yang telah disampaikan dalam buku ini memperlihatkan bahwa tuntutan terhadap lulusan SMK sangatlah besar. Target yang ditetapkan tergolong tinggi. Lulusan SMK diharapkan dapat menjadi tenaga kerja yang terampil dan berkualitas yang menguasai aspek-aspek *hard* maupun *soft skills*.

SMK harus dapat memadukan ilmu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*) dan sikap/tingkah laku (*attitude and behaviour*) untuk memenuhi standar kecakapan calon tenaga kerja. Lulusan SMK harus memiliki kompetensi yang merupakan perpaduan keterampilan dasar (*core skills*), keterampilan kerja (*employability skills*), dan keterampilan vokasi (*vocational skills*).

Tidak dipungkiri bahwa tantangan terbesar dunia pendidikan kejuruan adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai:

- 1) Kemampuan akademik (*academic skills*);
- 2) Kemampuan pada penguasaan keterampilan yang spesifik (*technical skills*); dan
- 3) Kemampuan keterampilan kerja (*employability skills*) yang seimbang.

Ketika ada keinginan untuk mengatur pendidikan kejuruan dalam bentuk undang-undang, maka beragam permasalahan yang disampaikan dalam buku ini dapat dijadikan pertimbangan awal. Perancangan undang-undang di Indonesia masih mengacu pada prinsip bahwa peraturan, terutama undang-undang, perlu dirancang jika memang ada kebutuhan pengelolaan khusus yang memengaruhi anggaran nasional, struktur pemerintah, atau kepatuhan *stakeholders* terhadap permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika tidak ada kebutuhan khusus untuk menyusun undang-undang mengenai SMK, maka pengaturan terhadap SMK dapat mengikuti format pengaturan di bawahnya.

Mengacu pada kekhususan pengaturan SMK, sebenarnya Inpres 9/2016 sudah mencukupi untuk dijadikan dasar pengembangan SMK. Namun pada praktiknya, pelaksanaan Inpres 9/2016 masih secara terpisah dipahami oleh masing-masing *stakeholders*. Laporan *Chapeau Paper Indonesia Technical and Vocational Education and Training* yang diinisiasi oleh Kemenko Perekonomian menyimpulkan bahwa ada permasalahan koordinasi antar-*stakeholders*. Kementerian/lembaga negara mempunyai rencana, peta jalan, dan kebijakan sendiri-sendiri yang menjadi unggulan. Akibatnya arah kebijakan para *stakeholders* tidak selalu sejalan, walaupun pada urutan pertama yang menjadi pertimbangan adalah mempersiapkan SDM yang tangguh untuk bersaing secara global. Kinerja pembinaan SMK secara nasional pun akhirnya tidak sesuai harapan dan tidak dapat menjawab tantangan pembangunan nasional pada umumnya dan kebutuhan DUDI pada khususnya.

Melalui buku ini, tim peneliti menyarankan agar lima area revitalisasi SMK dapat dijadikan dasar pertimbangan pengaturan SMK yang lebih komprehensif. Mengikuti mekanisme berjalannya sebuah sistem, mulai dari input, proses, dan berakhir pada *output*, maka proses yang berada di tengah menjadi inti dari revitalisasi SMK. Proses yang ada dalam sistem SMK melibatkan unsur DUDI, sekolah, dan pemerintah sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan. Jika satu dari tiga unsur ini tidak berperan aktif, maka hasil yang dicapai tidak akan maksimal. Inpres 9/2016 sebenarnya sudah cukup baik untuk dijadikan dasar dalam mengembangkan SMK.

DPR RI sebagai lembaga legislatif yang diamanatkan konstitusi negara untuk melaksanakan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi telah menjalankan fungsi tersebut melalui Panja Vokasi Komisi X.

Secara institusional, fungsi pengawasan yang dilaksanakan Panja Vokasi akan diikuti dengan pelaksanaan fungsi anggaran, dan pada gilirannya, jika dimungkinkan, akan diatur dalam undang-undang yang secara komprehensif mengatur sistem pendidikan Indonesia pada umumnya, dan sistem pendidikan kejuruan pada khususnya.

Daftar Pustaka

- Afrina, E. *et al.* (2018). *Vokasi di Era Revolusi Industri (Kajian Ketenagakerjaan di Daerah)*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
- Ana *et al.* (TT). Sejarah Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. *Presentasi*. Retrieved from http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._KESEJAHTERAAN_KELUARGA/197203071999032-ANA/Presentasi_Sejarah_PTK.pdf, on August 15, 2020.
- Ardiansyah, M. (2019, October 17). Expo SMK Resmi Digelar Tampilkan Karya Siswa Sekolah Kejuruan se-Sultra. *Media Kendari*. Retrieved from <https://mediakendari.com/expo-smk-resmi-digelar-tampilkan-karya-siswa-sekolah-kejuruan-se-sultra/56607/>, on July 13, 2020.
- Bappeda DIY. (2020). Jumlah Sekolah. Retrieved from http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/478-jumlah-sekolah, on July 3, 2020.
- Bappenas. (2016, May, 26). Reformasi Pendidikan di SMK Untuk Menyiapkan Tenaga Kerja Andal. Retrieved from <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/reformasi-pendidikan-di-smk-untuk-menyiapkan-tenaga-kerja-andal/>, on July 1, 2020.
- BPS Sultra. (2016). *Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2016*. Kendari: BPS Sultra.
- BPS Sultra. (2017). *Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2017*. Kendari: BPS Sultra.
- BPS Sultra. (2018). *Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2018*. Kendari: BPS Sultra.
- BPS Sultra. (2019). *Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2019*. Kendari: BPS Sultra.
- BPS Sultra. (2020). *Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2020*. Kendari: BPS Sultra.
- BPS. (2019). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (Edisi 109, Juni 2019)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2020). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (Edisi 121, Juni 2020)*. Jakarta: BPS.

- Cedefop. (2004). Towards a History of Vocational Education and Training (VET) in Europe in a Comparative Perspective. *Proceeding the First International Conference*. European Centre for the Development of Vocational Training, Florence.
- Chedi, J. M. (2015). The Need for the Incorporation of Ergonomics into Curriculum of the Technical and Vocational Education and Training for Teacher/Trainer Professionalization. *Makalah the 3rd UPI International Conference on Technical and Vocational Education and Training (TVET)*. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Damarjati, T. (2016, September 2). Konsep Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan. Retrieved from <http://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1869/konsep-pembelajaran-di-sekolah-menengah-kejuruan>, on January 28, 2020.
- Dell, M. & Olken, B. A. (2020). The Development Effects of the Extractive Colonial Economy: The Dutch Cultivation System in Java. *The Review of Economic Studies*, 87(1), January 2020: 164–203. doi: 10.1093/restud/rdz017.
- Disdikbud Sultra (2019, September 6). Kelompok Diskusi Terpumpunya Tindak Lanjut Peta Jalan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2019. Retrived from <https://disdikbud.sultraprov.go.id/kelompok-diskusi-terpumpunya-tindak-lanjut-peta-jalan-revitalisasi-sekolah-menengah-kejuruan-smk-tahun-2019/>, on July 17, 2020.
- Disdikbud Sultra. (2020). Statistik Data Pendidikan Sultra. Retrieved from https://disdikbud.sultraprov.go.id/?_page=2, on July 11 2020.
- Disdikpora DIY. (2020a, March 3). Evaluasi Strategi Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Prov. DIY/Tim. Penelitian Evaluasi Strategi Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- Disdikpora DIY. (2020b). Kebijakan Pelaksanaan Revitalisasi SMK DIY Tahun 2019, *Paparan* Dikpora DIY.
- Disnaker DIY. (2020, March 4). Evaluasi Strategi Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Prov. DIY/Tim Penelitian Evaluasi Strategi Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- Dit. PSMK. (2015). *Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015–2019*. Jakarta: Kemendikbud

- Dit. PSMK. (2016). *Revitalisasi Pendidikan Vokasi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Dit. PSMK. (2017). *Strategi Implementasi Revitalisasi SMK (10 Langkah Revitalisasi SMK)*. Jakarta: Kemendikbud.
- Dit. PSMK. (2018). *Kilasan Dua Tahun Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan September 2016-2018*. Jakarta: Kemendikbud.
- Dit. PSMK. (2019a). *Daya Saing SMK dalam Bursa Pasar Tenaga Kerja 4.0*. Jakarta: Kemendikbud.
- Dit. PSMK. (2019b). *Turbulensi Pendidikan Vokasi di Era Disrupsi 4.0*. Jakarta: Kemendikbud.
- Dit. PSMK. (2020a). Pengantar. Retrieved from http://revitalisasismk.id/revit/c_home/pengantar, on July 24, 2020.
- Dit. PSMK. (2020b). Grafik SMK. Retrieved from <http://datapokok.ditpsmk.net>, on July 8 2020.
- Dit. PSMK. (2020c). Data Pokok SMK Provinsi D.I. Yogyakarta. Retrieved from http://datapokok.ditpsmk.net/dashboard/kab?kode_prov=040000, on July 13, 2020.
- Dit. PSMK. (2020d). Data Pokok SMK Provinsi Sulawesi Tenggara. Retrieved from http://datapokok.ditpsmk.net/dashboard/kab?kode_prov=200000, on July 13, 2020.
- Effendy, M. (2017). Inpres sebagai Perikat Stakeholder Revitalisasi SMK. *Majalah SMK Edisi 4 Tahun 2017: Inpres Revitalisasi SMK sebagai Perikat Stakeholder*. Jakarta: Dit. PSMK.
- Fathoni, R. (2020, July 1). Berita Foto. Sekolah Menengah Kejuruan Perlu Lebih Kontekstual dengan Kebutuhan Industri. *Kompas.id*. Retrieved from <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2020/07/01/pembelajaran-sekolah-menengah-kejuruan-mengikuti-konteks-perkembangan-industri/>, on August 3, 2020.
- Fatma. (2019, November 13). Ironi, Jebolan SMK Kejuruan Dominasi Pengangguran di Sultra. *Berita Kota Kendari*. Retrieved from <https://beritakotakendari.com/2019/11/ironi-jebolan-smk-kejuruan-dominasi-pengangguran-di-sultra/>, on July 13, 2020.
- Hardiyanti, Y. (2011). Sejarah Pendidikan di Indonesia. *Makalah Mata Kuliah Filsafat Pendidikan*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Hasbullah. (2019, November 22). Komisi X DPR RI Minta Mendikbud Kedeponkan Transparansi Program Revitalisasi

- SMK. *Times Indonesia*. Retrieved from <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/240292/komisi-x-dpr-ri-minta-mendikbud-kedepankan-transparansi-program-revitalisasi-smk>, on August 9 2020
- Heeryl. (2019, December 4). 59,38 Persen SMK di Sultra Tidak Terakreditasi. *Kendari Pos*. Retrieved from <https://kendaripos.co.id/2019/12/5938-persen-smk-di-sultra-tidak-terakreditasi/2/>, on July 13, 2020.
- Hoeckel, K. & Schwartz, R. (2010). OECD Reviews of Vocational Education and Training: A Learning for Jobs Review of Germany 2010. *OECD Reviews of Vocational Education and Training*. Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264113800-e.
- ILO. (2020, May 27). ILO: More than one in six young people out of work due to COVID-19. Retrieved from https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_745879/lang-en/index.htm, on July 20, 2020.
- Indahri, Y. (2020). Permasalahan Pembelajaran Jarak Jauh di Era Pandemi. *Info Singkat*. Vol. XII, No. 12/II/Puslit/Juni/2020, 12–18.
- Julistian, U. (2019, September 4). Kemendikbud akan lakukan Evaluasi dan Revitalisasi SMK. Retrieved from <https://www.gatra.com/detail/news/442456/gaya-hidup/kemendikbud-akan-lakukan-evaluasi-dan-revitalisasi-smk>, on July 3 2020.
- Kamar Dagang dan Industri [KADIN] DIY. (2020, March 4). Evaluasi Strategi Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Prov. DIY/Tim Penelitian Evaluasi Strategi Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- Kamdi, W. (2017). Indonesia Menuju Negara Vokasi. *Majalah SMK Edisi 4 Tahun 2017: Inpres revitalisasi SMK sebagai perekat stakeholder*. Jakarta: Dit. PSMK.Direktorat Pembinaan SMK, Jakarta. ISBN 25279181. Retrieved from <http://repositori.kemdikbud.go.id/17852/1/Majalah%20SMK%20-%20Revitalisasi%20SMK.pdf>, on August 5, 2020.
- Kasman. (2020, February 23). Gedung Perpustakaan SMKN 1 Kusambi Ludes Dilahap Sijago Merah. *ZonaSultra.com*. Retrieved from <https://zonasultra.com/gedung-perpustakaan->

- smkn-1-kusambi-ludes-dilahap-sijago-merah.html, on July 13, 2020.
- Kemendikbud. (2016). *Statistik SMK 2015/2016*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud.
- Kemendikbud. (2017). *Statistik SMK 2016/2017*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud.
- Kemendikbud. (2018). *Statistik SMK 2017/2018*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud.
- Kemendikbud. (2019). *Statistik SMK 2018/2019*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud.
- Kemendikbud. (2020a). *Statistik SMK 2019/2020*. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemendikbud.
- Kemendikbud. (2020b). Data Sekolah Semester 2019/2020 Genap. Retrieved from <https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp>, on July 13, 2020.
- Kemendikbud. (2020c). Potret Capaian Program Revitalisasi SMK Saat Ini. *Jendela Kemendikbud, Edisi 44*/Juli 2020: 6. Retrieved from <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/potret-capaian-program-revitalisasi-smk-saat-ini>.
- Kemenko Perekonomian. (2019). Program Prioritas 4.3. Pengembangan Vokasi. Retrieved from <http://kinerja.ekon.go.id/berita/detail/program-prioritas-43-pengembangan-vokasi>, on July 17, 2020.
- Kemenperin. (2017, August 21). Kemenperin Usulkan Rp 800 Miliar untuk Revitalisasi 1700 SMK. Siaran Pers. Retrieved from <https://kemenperin.go.id/artikel/18027/Kemenperin-Usulkan-Rp-800-Miliar-untuk-Revitalisasi-1700-SMK>, on August 11, 2020.
- Kepmendikbud. (1997). Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK.
- Khurniawan, A. W. & Erda, G. (2019a). Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Melalui Revitalisasi Berkelanjutan. *Vocational Education Policy White Paper, 1*(19), 2–3.
- Khurniawan, A. W. & Erda, G. (2019b). Dinamika SMK Bidang Keahlian Kesehatan. *Vocational Education Policy White Paper, 1*(20).

- Khurniawan, A. W. & Haryani, T. (2015). *Sekolah Menengah Kejuruan dari Masa ke Masa*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Kemendikbud.
- Khurniawan, A.W. (2020, June 11). Pengumuman Hasil Jajak Pendapat Menuju New Normal Pendidikan SMK. Retrieved from <http://psmk.kemdikbud.go.id/konten/4650/pengumuman-hasil-jajak-pendapat-menuju-new-normal-pendidikan-smk>, on June 22, 2020.
- LANSKAP [William & Lily Foundation]. (2019). Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (SMK dan BLK) di Sumba Barat Daya. Retrieved from <http://wlf.or.id/webcms/images/website/382.pdf>, on July 24, 2020.
- Lazaridis, N. (2010). Education and Apprenticeship. In Elizabeth Froot, Willeke Wendrich (Eds.), *UCLA Encyclopaedia of Egyptology*, Los Angeles.
- Lestari, T. (2019, September 2). Dilema Program Revitaliasi SMK. *Media Indonesia*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/read/detail/256776-dilema-program-revitalisasi-smk>, on April 13, 2020.
- Makmur, D., Haryono, P.S., Musa, S., S., Hadi. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: CV. Manggala Bhakti.
- Malik, A., Jasmina, T., & Ahmad, T. (2019). Chapeau Paper Indonesia Technical and Vocational Education and Training. Retrieved from <https://sea-vet.net/images/seb/initiatives/document/527/final-tvet-chapeau-paper-10-march-2019proofread.pdf>, on July 17, 2020.
- Maysitoh., Agung, D. F., & Afdal. (2018). Pendidikan Kejuruan di Era 4.0: Tantangan dan Peluang Karier. *SCHOOLID: Indonesian Journal of School Counselling*, 3(3), 89-96. doi: 10.23916/08403011.
- McKinsey Global Institute [MGI]. (2012, September). The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential. Retrieved from https://www.mckinsey.com/-/media/McKinsey/Featured%20Insights/Asia%20Pacific/The%20archipelago%20economy/MGI_Unleashing_Indonesia_potential_Full_report.ashx, on April 3, 2020.
- Mertokusumo, S. (1996). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Nota Keuangan dan Rancangan APBN [NK RAPBN]. (2019). Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/media/10377/nota-keuangan-dan-rapbn-2019.pdf>, on July 18, 2020.
- OECD. (2020, May 6). VET in A Time of Crisis: Building Foundations for Resilient Vocational Education and Training Systems. Retrieved from <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/vet-in-a-time-of-crisis-building-foundations-for-resilient-vocational-education-and-training-systems-efff194c/>, on July 20, 2020.
- Onno. (2020, March 6). SMKN 4 Kendari Terbakar, Gedung Belajar dan Kantin Dilalap Api. *Inilah Sultra*. Retrieved from <https://inilahsultra.com/2020/03/06/smkn-4-kendari-terbakar-gedung-belajar-dan-kantin-dilalap-api/>, on July 13, 2020.
- P. H., Slamet. (2013) Pengembangan SMK Model untuk Masa Depan. *Cakrawala Pendidikan, Th. XXXII*(1). Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/1256/pdf>, on July 6, 2020.
- Pancawati, M. B. D. (2020a, February 20). Jalan Terjal SMK Era Digital. *Kompas.id*. Retrieved from <https://kompas.id/baca/riset/2020/02/20/jalan-terjal-smk-era-digital/>, on August 3, 2020.
- Pancawati, M. B. D. (2020b, January 16). Vokasi, Sejak VOC Sampai Jokowi, *Kompas.id*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/riset/2020/01/16/vokasi-sejak-voc-sampai-jokowi/>, on July 1, 2020.
- Pancawati, M. B. D. (2020c, June 4). Meneropong Celah Sinergi Vokasi dan Industri di Masa Pandemi. *Kompas.id*. Retrieved from <https://kompas.id/baca/riset/2020/06/04/meneropong-celah-sinergi-vokasi-dan-industri-di-masa-pandemi/>, on August 3, 2020.
- Panita Kerja Pendidikan Vokasi Komisi X [Panja Vokasi]. (2020). Laporan Panitia Kerja Pendidikan Vokasi Komisi X DPR RI: Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020. Retrieved from <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter--737-20200728121606.pdf>
- Perdirjen Dikdasmen. (2018). Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

- Permendikbud. (2017). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.
- Portal Resmi Sultra. (2019, September 02). Bank Sekolah, Kelas Industri, Teaching Factory, dan Kantin Sehat SMKN 1 Kendari. Retrieved from http://sultraprov.go.id/berita/bank_sekolah_kelas_industri_teaching_factory_dan_kantin_sehat_smkn_1_kendari, on July 13, 2020.
- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. (2019). *Potret Pendidikan Vokasi Indonesia: Apakah Mampu Menjawab Kebutuhan Tenaga Kerja Industri 4.0*. Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.
- Rei, C. (2012). Careers and Wages in the Dutch East India Company. *Cliometrica*. 8. doi: 10.1007/s11698-013-0093-3.
- Revitalisasi SMK. (2020). Pengantar. Retrieved from http://revitalisasismk.id/revit/c_home/pengantar, on July 1, 2020.
- Rudy. (2019, November 2). SMK Kelautan Kadatua Memprihatinkan, Komisi II DPRD Busel Konsultasi Disdikbud Sultra. *PublikSatu*. Retrieved from <https://publiksatu.co/2019/11/02/smk-kelautan-kadatua-memprihatinkan-komisi-ii-dprd-busel-konsultasi-disdikbud-sultra-159382>, on July 13, 2020.
- Seftiawan, D. (2019, September). Tahun 2020 ada 557 SMK yang direvitalisasi. *Pikiran Rakyat*. Retrieved from <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01319324/tahun-2020-ada-557-smk-yang-direvitalisasi>, on July 11, 2020.
- Setkab. (2016, September 13). Mayoritas Pengangguran Lulusan SMK, Presiden Jokowi Minta Sistem Pendidikan Vokasi Dirombak. Retrieved from <https://setkab.go.id/mayoritas-pengangguran-lulusan-smk-presiden-jokowi-minta-sistem-pendidikan-vokasi-dirombak/>, on April 3, 2020.
- SMK 5 DIY. (2020, Maret 3). Evaluasi Strategi Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Prov. DIY/Tim Penelitian Evaluasi Strategi Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- Supriadi, D. (2002). Satu Setengah Abad Pendidikan Kejuruan di Indonesia dalam Supriadi, D. *Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Kemdiknas.

- Tim Penyusun *Roadmap SMK 2030*. (2016). *Membangun Pendidikan Menengah Kejuruan Indonesia Sebuah Peta Jalan Menuju 2030*. Bonn and Eschborn: the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
- UNEVOC. (2020, July 6–14). UNESCO-UNEVOC Virtual Conference on Skills for a Resilient Youth. Retrieved from <https://unevoc.unesco.org/home/Virtual+conference+on+skills+for+a+resilient+youth>, on July 1, 2020.
- Wihandari, S. N. (2014). Filsafat Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. *Laporan Tugas*. Program Pascasarjana Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Negeri Padang.
- Wijana, E. P. E. & Maulina, M. R. (2020, March 16). Cegah Corona, SMK N 1 Bantul Tarik Siswa PKL. Retrieved from <https://jogja.suara.com/read/2020/03/16/134930/cegah-corona-smk-n-1-bantul-tarik-siswa-pkl>., on August 6, 2020.
- Yahya, M. (2018). Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang Perkembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia. *Pidato Pengukuhan* Penerimaan Jabatan Professor Tetap dalam Bidang Ilmu Pendidikan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Disampaikan pada Sidang Terbuka Luar Biasa Senat Universitas Negeri Makassar, 1 Maret 2018. Retrieved from <https://core.ac.uk/reader/154762984>, on July 31, 2020.
- Yuliandri. (2009). *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zulkarnaini. (2020). Berita Foto. Sekolah Menengah Kejuruan Perlu Lebih Kontekstual dengan Kebutuhan Industri. *Kompas.id*. Retrieved from <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2020/07/01/pembelajaran-sekolah-menengah-kejuruan-mengikuti-konteks-perkembangan-industri/>, on August 3, 2020.

Biografi Penyunting

Santri E. P. Djahimo, S.,Pd., M.App.Ling., Ph.D., Post Grad. Dip (RMS) adalah Dosen Bahasa Inggris Program Studi Bahasa Inggris, Universitas Nusa Cendana (UNDANA). Penyunting juga seorang peneliti dan penulis. Menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Universitas Nusa Cendana, Kupang-NTT, gelar magister dan doktor dari *Macquarie University*, Sydney, Australia. Penyunting juga menyelesaikan gelar pasca-sarjana dalam *Research Methods and Skills* di *Maastricht School of Management*, Maastricht, Belanda. Minat penelitiannya adalah pada pengajaran keterampilan bahasa Inggris dan inovasi pendidikan di daerah pedesaan. Beberapa karya tulis ilmiah telah diterbitkan di beberapa jurnal dan prosiding nasional dan internasional, baik secara individu maupun dalam bentuk kolaborasi, di antaranya “*The Use of Language Learning Strategies in Speaking Subject*” (2019), “*Language and Attitude: A Review and Reflection on Tourism and Hospitality in NTT Province, Indonesia*” (2019), dan “*The Effect of English Day Policy on the Language Acquisition of Public Servant in East Nusa Tenggara Province*” (2019). Penyunting dapat dihubungi pada *e-mail* sunthree_dj@yahoo.com.

Biografi Penulis

Yulia Indahri. Penulis adalah peneliti Pengembangan Budaya Desa dan Kota di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Menyelesaikan pendidikan sarjana Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta pada tahun 1999 dan *Master of Arts University of East Anglia*, Norwich pada tahun 2003. Beberapa karya tulis ilmiah telah dipublikasikan dalam beberapa buku dan jurnal, di antaranya: “Upaya *Asian Parliamentary Assembly* (APA) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Asia” (2016), “Permasalahan Organisasi Profesi Guru” (2017), “Penanggulangan Bencana dan Peran Masyarakat” (2017), “Dampak Sosial Pengembangan Pariwisata Indonesia” (2018), dan “Peran Sekolah dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah” (2019). Peneliti dapat dihubungi pada *e-mail* yulia.indahri@dpr.go.id.

Elga Andina. Penulis adalah peneliti Psikologi di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Menyelesaikan pendidikan sarjana Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2005 dan Pendidikan Profesi Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Indonesia pada tahun 2008. Beberapa karya tulis ilmiah telah dipublikasikan dalam beberapa buku dan jurnal, di antaranya: “Budaya Kekerasan Antar-Anak di Sekolah Dasar” (2014), “Melawan Terorisme di Era Digital” (2017), “Layanan Kesehatan Jiwa Dasar di Era Jaminan Kesehatan Nasional” (2017), dan “Efektivitas Pengukuran Kompetensi Guru” (2018). Peneliti dapat dihubungi pada *e-mail* elga.andina@dpr.go.id.

Shanti Dwi Kartika. Penulis adalah peneliti Hukum di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta pada tahun 2003 dan program pendidikan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. pada tahun 2009. Beberapa karya tulis ilmiah telah dipublikasikan dalam beberapa buku dan jurnal, di antaranya: “Implikasi Yuridis Putusan *Judicial Review* UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan”

(2010), “Otonomi Pendidikan bagi Perguruan Tinggi” (2012), “Keamanan Maritim dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum” (2014), *“Regulatory Problems of Disaster Management in Indonesia”* (2017), dan “Otonomi Desa Pasca Berlaku Undang-Undang Desa” (2018). Peneliti dapat dihubungi pada *e-mail* shanti.dk@gmail.com.

Indeks

A

Ambacht Leergang 22, 23
Ambacht School 23
Ambacht School van Soerabaja
21
Ambon 13
anggaran 6, 10, 15, 84, 99, 100,
105, 110, 117, 119, 126,
127, 130, 131, 133
angkatan kerja 2, 3, 4, 110
apprenticeship 19, 31, 65
asesor kompetensi 68

B

Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP) 66, 67,
68, 73, 104, 119, 120,
121, 122
Balai Latihan Kerja (BLK) 37,
39, 48, 55, 71, 74, 75, 77,
89, 92, 130
Batavische School 13
Belanda 12, 13, 21, 23, 24, 26,
61, 108
Beroepsen Vakopledingen 21
Beroepsund Fachschule 21
Beroesonderwijs 21
bonus demografi 63
Burgerscholl 13

C

Ciroyom 23

Coronavirus Disease

(COVID-19) 7, 8, 9, 107,
108, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 130, 132

D

Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) 7, 8, 9, 41, 42, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94
daring 45, 89, 108, 110, 111,
112, 113, 114, 115
demand 76
demand-driven 33, 37, 62, 82,
83, 85
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (Disdikbud)
94, 96, 97, 99
Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga (Disdikpora) 85,
86, 88, 89, 91, 92
Direktorat Pembinaan SMK
(Dit. PSMK) 2, 3, 5, 6,
7, 39, 40, 41, 49, 51, 55,
59, 60, 62, 65, 70, 80, 86,
87, 90, 91, 95, 96, 97, 98,
102, 111
dunia kerja 1, 7, 19, 25, 30, 33,
34, 36, 39, 42, 59, 65, 66,
67, 69, 93, 120, 121, 130,
133
dunia usaha dan/atau dunia
industri (DUDI) 1, 3,
4, 5, 6, 7, 25, 27, 30, 31,

33, 34, 35, 36, 39, 51, 53,
55, 56, 57, 59, 62, 63, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 88, 90,
91, 92, 93, 94, 97, 98, 99,
101, 102, 103, 104, 105,
108, 109, 110, 111, 114,
115, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 129, 131, 132,
133

F

formasi kerja 3

H

hands-on experience 34

hard skills 65

Hindia Belanda 13, 20, 21, 22

Hindu-Budha 11, 20

Hogere Burgerschool (HBS) 21

I

Industrie und Handelskammer
(IHK) Trier 126

Instruksi Presiden Nomor 9

Tahun 2016 tentang

Revitalisasi SMK (Inpres

9/2016) 1, 5, 6, 62, 70,

71, 73, 74, 84, 100, 101,

103, 104, 124, 129, 131

Islam 11, 12, 13, 20

J

Jepang 23, 61

K

Kalimantan 40, 65, 75

kecakapan 11, 17, 55, 118

Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

(Kemenko Perekonomian)

74, 75, 76

Kementerian Perindustrian

(Kemenperin) 74, 77, 78,

103, 127

kemerdekaan 8, 14, 23, 24, 35,

129

keunggulan lokal 5, 54

kewirausahaan 60, 76, 82, 111,

126

kolonial 9, 11, 12, 13, 20

Komisi X DPR RI 9, 10, 80,

117, 120, 130, 131, 133

kompetensi 30, 36, 37, 39, 43,

46, 47, 48, 51, 52, 53, 54,

56

Koningin Wilhelmina School 22

kualifikasi akademik 53

kurikulum 4, 6, 7, 20, 23, 25,

26, 28, 29, 30, 35, 36, 39,

42, 49, 51, 52, 55, 56, 62,

63, 66, 71, 74, 75, 76, 77,

79, 81, 83, 88, 89, 91, 96,

97, 101, 102, 103, 104,

105, 107, 111, 114, 115,

117, 121, 123, 125, 126,

130, 132

Kweekschool 22

L

laboratorium 44, 52, 69, 99,

124, 127, 133

learning by doing 34

lembaga sertifikasi profesi (LSP)

67, 68, 73, 85, 92, 93,

104, 119, 120, 122, 123

- link and match* 31, 52, 62, 77,
78, 79, 80, 83, 85, 88,
102, 117, 121, 122, 123,
129
- lulusan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 29,
33, 39, 42, 46, 48, 51, 56,
60, 61, 62, 63, 67, 68, 70,
71, 72, 73, 74, 76, 81, 82,
83, 88, 89, 91, 92, 93, 94,
96, 97, 98, 99, 101, 103,
104, 107, 108, 109, 115,
117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 129,
130, 131, 132
- M**
- madrasah aliyah kejuruan
(MAK) 39, 49, 50, 51,
56, 63, 74, 77, 130
- magang 19, 31, 34, 50, 53, 65,
71, 72, 73, 80, 82, 88, 90,
92, 102, 103, 104, 105,
108, 109, 110, 122, 123,
132
- Maluku 12, 20, 40, 41
- manpower demand approach* 36
- manusia seutuhnya 16, 132
- Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) 3, 60
- Mataram Kuno 12
- mismatch* 59, 97, 120
- multimakna 17
- N**
- Nawacita 60, 61
- P**
- Panitia Kerja (Panja) 80, 117,
118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 130,
133
- pasca-kemerdekaan 11, 24, 33
- Pelita 24
- Pelita I 24, 25, 26
- Pelita II 24, 25, 27
- Pelita III 24, 25, 27
- Pelita IV 24, 25, 29
- Pelita V 24, 25, 30, 52
- Pelita VI 31, 34
- pemagangan 52, 53, 76, 77,
78, 91, 92, 103, 108, 110,
122, 123, 126
- Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
107, 108, 110, 112, 113,
115, 132
- pemerintah daerah (pemda) 4,
5, 55, 70, 71, 75, 76, 85,
114, 115, 119, 122, 127
- penganggur 1, 52, 129
- pengangguran 1, 4, 51, 61, 89,
94, 95, 107, 109, 122,
123, 125, 129
- penyerapan 2, 7, 42, 76, 121
- pesantren 12, 13
- peta jalan (*roadmap*) 6, 68, 71,
74, 75, 76, 77, 94, 100,
102, 103, 118, 130
- pilot project* 55, 74, 75, 76
- politeknik 37, 39, 48, 60, 77,
89, 117, 122, 130
- Portugis 12, 20
- PP Guru 53, 64
- prakolonial 11, 12
- praktik kerja 20, 34, 71, 76, 77,
80, 125, 126
- praktik kerja industri (prakerin)
52, 53, 66, 91, 103, 114,
123, 125

praktik kerja lapangan (PKL)
50, 71, 72, 73, 81, 91,
102, 104, 105, 111, 115
*pupillenkorp*s 22

R

Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional
(RPJMN) 15, 16
Rencana Pembangunan
Pendidikan Nasional
Jangka Panjang (RPPNJP)
15
re-thinking skills 3

S

sarana dan prasarana (sarpras) 5,
6, 39, 60, 62, 63, 69, 70,
71, 73, 78, 82, 84, 93, 99,
103, 105, 112, 113, 114,
118, 119, 121, 122, 124,
125, 126, 133
school-based enterprise 34, 65,
132
sepanjang hayat 17, 132
sertifikasi kompetensi 66, 67,
68, 69, 73, 93, 103, 108,
109
sertifikasi kompetensi kerja 66,
67, 68
sertifikasi kompetensi lulusan
73, 81, 104
sertifikat pendidik 53, 64
sistem ganda 19, 31, 34, 36, 78,
81, 132
skill intensive economies 3
SMEA 28, 29, 30, 35, 36
SMEA Pembina 29, 36
social demand approach 36

soft skills 65
standar kompetensi 53, 56, 62,
65, 66, 78, 93, 102, 104,
105, 120, 125
Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia
(SKKNI) 71, 72, 73, 102,
104, 120, 125
STM 23, 26, 28, 30, 35, 36
STM Pembangunan 26, 28, 35,
36
Sulawesi Tenggara (Sultra) 8, 9,
41, 42, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99
supply-demand 55, 62
supply-driven 37, 62, 83
Sustainable Development Goals
2030 (SDGs) 60

T

teaching factory 52, 71, 72, 73,
76, 81, 99
Technische School 23
Tempat Uji Kompetensi (TUK)
66, 67, 68
tenaga kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 13, 19, 21, 25, 26, 36,
39, 42, 48, 51, 52, 55, 56,
59, 60, 61, 62, 66, 69, 70,
71, 76, 78, 85, 91, 94, 95,
107, 118, 120, 121, 125,
130
Theologicum 13
tingkat pengangguran terbuka
4, 94

U

uji kompetensi 67, 68

Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (UU
Naker) 49, 51, 52, 53

Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (UU GD) 49,
52, 53

Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan
Nasional (UU Sisdiknas)
49, 50, 51, 54, 63, 101

Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (UU
Pemda) 49, 54, 55, 62,
122

unit produksi 30, 34, 69

V

Vereenigde Oost-Indische

Compagnie (VOC) 20

Victor Karlovich Della-Vos 20

vocational education 7, 21, 50,
133

W

wirausaha 6, 51, 89, 130

workshop 20, 52, 75, 127, 133